JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

DIGITALISASI LAYANAN LEGALISASI DOKUMEN PENEMPATAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN PRA-PENEMPATAN PMI TUJUAN TAIWAN DI P4MI SIDOARJO TAHUN 2026

Debora Fany Ilfi Nurdiana[1], Muhammad Qobidl 'Ainul Arif[2]
Prodi Hubungan Internasional
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
e-mail: deborafanyy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis digitalisasi layanan legalisasi Surat Pernyataan Biaya dan Gaji serta Perjanjian Kerja di P4MI Sidoarjo tahun 2026 sebagai bantuk perlindungan pra-penempatan yang diberikan oleh negara sebagai bagian dari tata kelola migrasi internasional. Digitalisasi layanan menjadi penting karena Taiwan menjadi salah satu negara tujuan bagi pekerja migran Indonesia, sehingga dibutuhkan proses administrasi pra-penempatan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis data layanan legalisasi sebelum dan sesudah digitalisasi. Pendekatan *E-Government* digunakan dalam penelitian ini dengan indikator efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan produktivitas pelayanan, dibuktikan dengan peningkatan jumlah legalisasi dokumen dari 5,77 menjadi 8,84 berkas per harinya. Namun demikian, kendala jaringan dan server juga menjadi hambatan utama dalam mekanisme ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan legalisasi berkontribusi positif terhadap modernisasi pelayanan publik dan perlindungan pra-penempatan pekerja migran Indonesia.

Kata Kunci : Digitalisasi layanan, E-government, Pekerja Migran Indonesia, Tata kelola migrasi, P4MI Sidoarjo.

ABSTRACT

This study aims to analyze the digitalization of service for the legalization of the Statement of Costs and Wages as well as the Employment Agreement at P4MI Sidoarjo in 2026, as a form of pre-placement protection provided by the state as part of international migration governance. Service digitalization is crucial because Taiwan is one of the main destinations for Indonesian migrant workers, thus requiring an effective, transparent, and accountable pre-placement administrative process. This research uses a descriptive qualitative method, with data collection techniques including observation, interviews, and analysis of legalization service data before and after digitalization. The E-Government approach is applied, using the indicators of efficiency, transparency, accessibility, and accountability. The findings indicate that digitalization improves service productivity, as shown by an increase in the average daily document legalization from 5.77 to 8.84 documents per day. However, network and server issues remain the primary obstacles in this mechanism. This study concludes that digitalization of legalization services contributes positively to the modernization of public services and the pre-placement protection of Indonesian migrant workers.

Keywords : *Digitalization of services, E-government, Indonesian Migrant Workers, Migration Governance, P4MI Sidoarjo*

PENDAHULUAN

Globalisasi yang semakin berkembang telah membawa perubahan besar dalam hubungan ekonomi, sosial, dan ketenagakerjaan lintas negara. Dampak nyata dari perkembangan globalisasi ini adalah tingginya perpindahan tenaga kerja sekaligus menjadi bentuk pemenuhan pasar kerja global. Kemajuan teknologi transportasi, kemudahan akses terhadap informasi, meluasnya kerja sama ekonomi yang terjalin antar negara juga menjadi faktor kemudahan perpindahan tenaga kerja yang terjadi (Wibowo *et al.*, 2025). Bagi negara berkembang, migrasi tenaga kerja dimanfaatkan sebagai alternatif dalam memperoleh pekerjaan yang lebih layak, pendapatan yang tinggi, serta meningkatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga (Andriani, Prasetiyo and Ponorogo, 2024). Fenomena ini juga menunjukkan bagaimana tenaga kerja menjadi bagian dari arus globalisasi yang tidak hanya melibatkan perdagangan barang dan jasa, namun juga pada pergerakan sumber daya manusia secara lintas negara.

Di Indonesia, migrasi tenaga kerja internasional menjadi sesuatu yang cukup penting dalam dinamika ketenagakerjaan dan perkonomian nasional. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dengan angka angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya, sedikitnya lapangan kerja di dalam negeri, menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat menjadikan bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif. Maka dari itu, keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) saat ini menjadi salah satu komponen paling penting dalam struktur ketenagakerjaan nasional (Wibowo *et al.*, 2025). Kemudian, sumbangan ekonomi berupa remitansi yang dikirimkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menjadi bagian kontribusi perkonomian Indonesia (Andriani, Prasetiyo and Ponorogo, 2024).

Indonesia menjadi salah satu negara di Asia Tenggara dengan predikat pengirim pekerja migran terbesar di kawasan Asia dengan tujuan negara penempatan yang beragam, seperti di Malaysia, Hong Kong, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan. Di antara beberapa negara tujuan ini, Taiwan ada pada posisi yang cukup strategis dalam penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) (Hamonangan, 2025). Tingginya permintaan Taiwan terhadap tenaga kerja asing menjadikannya sebagai salah satu negara dengan pasar kerja luar negeri yang menjanjikan, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), sepanjang tahun 2025 terdapat 296.948 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan di berbagai negara, sebanyak 89.960 PMI ditempatkan di Taiwan. Dari jumlah tersebut, sekitar 30,3% merupakan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) dengan negara tujuan penempatan Taiwan (Yonatan, 2025). Posisi Taiwan sebagai tujuan utama perpindahan tenaga kerja ini menunjukkan adanya hubungan ketenagakerjaan yang kuat antara Indonesia dengan Taiwan, sekaligus menunjukkan pada bagaimana tata kelola penempatan ke negara tersebut menjadi penting terhadap keseluruhan sistem migrasi pekerja kerja Indonesia (PMI).

Tingginya jumlah penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Taiwan menunjukkan bahwasannya segala bentuk proses administrasi, pengawasan, hingga pada perlindungan yang harus diberikan kepada pekerja migran Indonesia (PMI) dengan lebih serius dan sistematis. Berbagai bentuk risiko yang harus dihadapi oleh pekerja migran Indonesia, seperti ketidaksesuaian identitas, kontrak kerja yang tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dijanjikan, hingga pada pembebanan biaya yang melebihi ketentuan. Risiko-risiko ini akan menimbulkan suatu tantangan tersendiri bagi pekerja jika sudah ada di negara tujuan, karena akan dibutuhkan penyelesaian yang lebih kompleks dan melibatkan yurisdiksi antar negara (Bahagijo and Aryani, 2021). Oleh karena itu, negara juga perlu memastikan bahwa seluruh tahapan sebelum keberangkatan dilaksanakan dengan cermat agar mengurangi permasalahan yang terjadi.

Migration Governance merupakan tata kelola migrasi yang melibatkan norma, kebijakan, institusi, dan mekanisme yanf memfasilitasi migrasi secara tertib, aman, dan teratur. Dalam penelitian ini, *International Organization Migration* (IOM) mengembangkan *Migration*

Governance Framework (MiGOF) sebagai panduan negara untuk mewujudkan tata kelola migrasi yang efektif. Kerangka ini relevan dalam memahami pentingnya tata kelola migrasi yang mementingkan keselamatan dan hak-hak migran, termasuk proses administrasi penempatan yang memadai (Elgar, 2023). Di Indonesia, urgensi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI), selama tahap sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja (Indonesia, 2017). Ketentuan ini menegaskan bahwa proses administrasi dan verifikasi dokumen merupakan bagian yang penting dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum keberangkatan.

Legalisasi dokumen Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) serta Perjanjian Kerja (PK) menjadi salah satu tahap bentuk perlindungan pada tahap pra-penempatan. SPBG sendiri memuat informasi mengenai biaya penempatan dan gaji, sedangkan PK mengatur hubungan kerja antara Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan pemberi kerja, termasuk hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. Oleh karena itu, pemeriksaan dan legalisasi kedua dokumen ini sangat penting untuk memastikan kesesuaian informasi serta untuk mengurangi risiko adanya ketidaksesuaian data, ketidakjelasan ketentuan kerja, pembebanan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan. Maka dari itu, kualitas pelaksanaan legalisasi SPBG dan PK menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mendukung perlindungan PMI sebelum bekerja.

Sejalan dengan perkembangan pelayanan publik berbasis teknologi, Kementrian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menerapkan digitalisasi layanan legalisasi Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) dan Perjanjian Kerja (PK) bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) dengan tujuan Taiwan melalui Sisko P2MI. Mekanisme ini memanfaatkan ruang digital dalam pengajuan dokumen oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indoensia (P3MI), proses verifikasi oleh petugas berwenang, hingga pada penerbitan hasil legalisasi dalam bentuk digital yaitu QR Code (Pelindungan and Migran, 2026). Penerapan sistem ini menjadi bentuk perubahan mekanisme pelayanan administrasi dari proses manua menuju layanan berbasis digital.

Digitalisasi layanan dokumen SPBG dan PK pada dasarnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI). Digitalisasi ini memungkinkan mempercepat proses layanan, mempermudah akses pengajuan dokumen oleh perusahaan penempatan, sehingga dapat meminimalisasikan keterlambatan pelayanan serta mengurangi ketergantungan terhadap dokumen fisik. Namun, mekanisme digitalisasi ini masih berpotensi menghadapi berbagai kendala dan masih adanya ketergantungan dengan stabiltas jaringan dan server pusat. Kemudian proses verifikasi yang masih tetap memerlukan adanya koordinasi antar pihak secara berjenjang, sehingga dalam kondisi tertentu masih memakan waktu juga dalam pelayanannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan digitalisasi yang berorientasi pada efisiensi pelayanan, sedangkan realitas lapangan masih terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi (‘Hasil Wawancara’, 2026). Temuan awal ini menunjukkan pentingnya untuk mengkaji pelaksanaan layanan legalisasi SPBG dan PK, khususnya dalam mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh petugas P4MI Sidoarjo.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia (PMI) dari berbagai perspektif, namun masih banyak ketebatasan dalam ruang lingkup pembahasannya. Penelitian pertama yang disusun oleh Oscar Nomphi, Helsina Fransiska, dan Orpa Julliana yang berjudul *“Perlindungan Pra Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Kupang Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”*, penelitian ini berfokus pada perlindungan pra-penempatan dari perspektif pelayanan publik instansi pemerintah daerah (Dethan, Pello and Nubatonis, 2025). Penelitian selanjutnya yang disusun oleh Bonefasius Bao, Hendrik Vallen Ayomi, Hendry Bakri, dan Ndibau yang berjudul

"*Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura",* penelitian ini membuktikan bahwasannya implementasi *E-Government* di pemerintahan daerah dapat meningkatkan transparantasi, mencegah penyimpangan, dan mendorong *good governence*, (Bao *et al.*, 2023). Kedua penelitian tersebut memberikan pemahaman dalam perlindungan PMI dan penerapan digitalisasi legalisasi pelayanan publik. Namun, penelitian ini akan mengkaji digitalisasi legalisasi Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) dan Perjanjian Kerja (PK) sebagai bagian dari mekanisme perlindungan pra-penempatan PMI tujuan Taiwan di P4MI Sidoarjo.

Penelitian ini akan berfokus pada pelaksanaan digitalisasi layanan legalisasi SPBG dan PK sebagai bentuk perlindungan pra-penempatan PMI tujuan Taiwan di P4MI Sidoarjo dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *E-Government* serta kerangka perlindungan PMI yang tertuang dalam Undang-Undang No.18 tahun 2017. Kemudian, penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatan teknins dan kendala pelaksanaan layanan yang dihadapi di P4MI Sidoarjo. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan bagaimana digitalisasi layanan administrasi penempatan dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan pra-penempatan PMI, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanannya di tingkat operasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Syahrizal and Jailani, 2023). Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana digitalisasi layanan legalisasi dokumen SPBG dan PK dalam proses penempatan PMI. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pelaksanaan, kendala yang dihadapi, hingga dinamika layanan di lapangan. Penelitian ini dibatasi pada peaksanaan digitalisasi layanan legalisasi dokumen SPBG dan PK selama periode Januari hingga April 2026. Pembatasan periode ini dimaksudkan untuk memusatkan analisis pada pelaksanaan ayanan dalam rentang waktu penelitian, termasuk proses verifikasi dokumen, pemanfaatan sistem digital, serta kendala yang muncul selama pelaksanaannya. Dengan demikian, data dan temuan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada periode Januari-April 2026 dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kesuluruhan pelaksanaan layanan di luar periode tersebut.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan Vernanda Reftiyani Ramadhani, seorang analis ketenagakerjaan di P4MI Sidoarjo yang terlibat langsung dalam proses verifikasi dokumen, sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait bagaimana implementasi dari digitalisasi mekanisme legalisasi dokumen ini. Kemudian, data sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen perundang-undangan, laporan pelayanan legalisasi SPBG dan PK di P4MI Sidoarjo selama Januari-April 2026, dan literatur ilmiah yang relevan dengan konteks penelitian. Penggunaan data ini bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara, serta memberikan gambaran mengenai pelaksanaan digitalisasi layanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *E-Government* yang digagas oleh Indrajit, yang menegaskan bahwasannya konsep *E-Government* sendiri tidak berputar pada penggunaan komputer ataupun teknologi-teknologi lainnya dalam pengimplementasiannya. Namun, konsep *E-Government* ini menekankan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah. Selain itu, dibutuhkan beberapa elemen untuk menentukan kesiapan pemerintahan dalam penerapan *E-Government ini*, yaitu efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan akuntabilitas layanan (Richardus and Indrajit, 2005). Elemen-elemen ini nantinya akan digunakan dalam menganalisis digitalisasi yang berjalan dalam layanan legalisasi SPBG dan PK

di P4MI Sidoarjo.

PEMBAHASAN

P4MI Sidoarjo sebagai Pelaksana Layanan Digitalisasi Legalisasi

P4MI Sidoarjo merupakan unit pelaksana pelayanan yang berada di bawah kementerian perlindungan pekerja migran Indonesia (KP2MI), P4MI Sidoarjo memiliki peran yang cukup signifikan dalam memberikan pelayanan administrasi kepada calon pekerja mgran Indonesia (CPMI) maupun pemberian pelayanan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI). Dalam pelaksanaan tugasnya, P4MI Sidoarjo menjadi salah satu titik layanan yang menangani proses administratif penempatan pekerja migran, termasuk pada pelayanan yang berkaitan dengan legalisasi dokumen penempatan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja ke luar negeri (Susilo, 2026). Dengan keberadaan P4MI Sidoarjo di Jawa Timur dan mengingat bahwasannya wilayah Jawa Timur menjadi penyumbang pekerja migran yang tinggi.

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh P4MI Sidoarjo adalah legalisasi dokumen penempatan bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dengan tujuan Taiwan. Dokumen yang diproses sebagai persyaratan penempatan ini adalah surat pernyataan biaya dan gaji (SPBG) dan perjanjian kerja (PK). SPBG merupakan dokumen yang berisikan informasi biaya penempaan dan besar gaji yang akan diterima oleh pekerja, sedangkan PK merupakan dokumen yang berisikan ketentuan hubungan kerja yang sebelumnya telah disepakati oleh calon pekerja dan pemberi kerja, data-data yang tercantum didalamnya diantaranya adalah jenis pekerjaan, masa kerja, hak, dan kewajiban dari para pihak, serta ketentuan upah/gaji (Pelindungan and Migran, 2026). Dalam kerangka Migration Governance Framework (MiGOF), kedua dokumen ini telah memenuhi hak dan perlindungan pekerja migran melalui kejelasan informasi biaya dan kontrak kerja yang menjadi instrumen penting didalam MiGOF.

Seiring perkembangan pelayanan publik berbasis teknologi, mekanisme dalam legalisasi dokumen SPBG dan PK yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini telah bertransformasi ke sistem digital. Berdasarkan surat pemberitahuan implementasi layanan yang menjadi dasar pelaksanaan, digitalisasi legalisasi SPBG dan PK mulai diberlakukan pada 11 Maret 2026 melalui sistem Sisko P2MI (Pelindungan and Migran, 2026). Melalui sistem ini, proses pengajuan legalisasi dilakukan secara daring oleh P3MI dengan menggunggah dokumen persyaratan milik calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ke dalam sistem, sehingga dengan adanya digitalisasi ini pengguna layanan tidak datang langsung ke kantor pelayanan. Setelah pengajuan dokumen, petugas di P4MI Sidoarjo melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang masuk sebelumnya di sistem. Kemudian dokumen yang telah memenuhi ketentuan kemudian diproses lebih lanjut sesuai dengan alur persetujuan yang berlaku hingga diterbitkan hasil legalisasi dalam bentuk digital. Hasil legalisasi tersebut berupa QR Code sebagai bentuk pengesahan dokumen dan memudahkan proses verifikasi keabsahan dokumen yang telah diterbitkan (‘Hasil Wawancara’, 2026).

Digitalisasi layanan legalisasi di P4MI Sidoarjo pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kulitas layanan melalui proses yang lebih cepat, praktis, dan terdokumentasi. Selain dalam mempermudah pengajuan dokumen, sistem digital ini juga dapat membantu penyimpanan arsip secara elektronik sehingga mempermudah dalam penelusuran proses layanan. Dengan demikian, PM4I Sidoarjo tidak hanya berperan sebagai pelaksana layanan administrasi, namun juga sebagai bentuk komitmen dalam membangun tata kelola migrasi yang lebih tertib, aman, dan teratur sesuai dengan Undang-undang No.18 tahun 2017.

Analisis Digitalisasi Layanan Legalisasi melalui Pendekatan *E-Government*

Implementasi digitalisasi layanan legalisasi SPBG dan PK di P4MI Sidoarjo ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan *E-Government,* yaitu dengan memanfaatkan pemanfaat teknologi informasi

dalam penyelanggaraan pelayanan publiknya. Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini akan menggunakan empat elemen utama, yaitu efisiensi, transparansi, aksesibilitas, dan akuntanbilitas layanan (Richardus and Indrajit, 2005).

Salah satu tujuan utama dari digitalisasi pelayanan publik adalah untuk meningkatkan efisiensi proses kerja. Transformasi layanan legalisasi SPBG dan PK di P4MI Sidoarjo yang dialihkan ke dalam sistem digital, menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pelayanan. Sebelum implementasi digitalisasi, yaitu tepatnya pada periode 1 Januari hingga 10 Maret 2026 jumlah legalisasi dokumen yang masuk di P4MI Sidoarjo tercatat sebanyak 398 berkas, dengan 244 diantaranya dalam sektor formal dan 130 adalah informal. Sedangkan, setelah ditetapkannya digitalisasi pada pelayanan legalisasi SPBG dan PK ini yang dimulai pada 11 Maret hingga April tahun 2026, jumlah legalisasi mencapai 442 berkas dengan 312 diantaranya datang dari sektor formal dan 130 diantaranya datang dari sektor informal (Sidoarjo, 2026).

SEKTOR	JANUARI	FEBRUARI	MARET (PRA-DIGITALISASI)	MARET (AWAL DIGITALISASI)	APRIL
FORMAL	72	125	47	125	187
INFORMAL	61	69	24	32	98
TOTAL	133	194	71	157	285

Table 1. Data Pendaftaran Legalisasi SPBG dan PK di P4MI Sidoarjo

Hasil analisis menghasilkan dari durasi waktu pelayanan, dengan periode sebelum digitalisasi yang berlangsung selama 69 hari, sedangkan periode setelah ditetapkannya digitalisasi yang sudah berjalan selama 50 hari. Maka dari itu, rata-rata pelayanan sebelum digitalisasi yaitu 5,77 berkas per hari, sedangkan setelah ditetapkannya digitalisasi meningkat setidaknya 8,84 berkas perharinya. Peningkatan efisiensi ini menjadi sangat penting karena jika adanya keterlambatan dalam proses legalisasi dokumen, maka secara langsung juga dapat mempengaruhi jadwal keberangkatan PMI ke Taiwan dan akan berdampak pada pemenuhan permintaan tenaga kerja oleh pemberi kerja.

Elemen kedua dalam pendekatan *E-Government* ini adalah transparansi, yang menekankan pada keterbukaan informasi dan kejelasan dalam proses layanan (Richardus and Indrajit, 2005). Pada sistem digitalisasi legalisasi dokumen SPBG dan PK ini telah diatur melalui platform daring dalam pengajuan dokumennya. Sehingga pengguna layanan dapat mengetahui tahapan pengajuan dokumen sejak dari proses unggah berkas, verifikasi petugas, hingga pada penerbitan hasil legalisasi ini. Hasil legalisasi yang diterbitkan dalam bentuk QR Code ini menjadi bentuk transparansi dan validasi keabsahan dokumen yang dapat diperiksa kembali melalui sistem, sehingga dapat mengurangi potensi adanya manipulasi kontrak kerja, ketidakjelasan biaya, hingga pada penyimpangan administrasi yang dapat merugikan PMI setelah tiba di negara tujuan.

Elemen ketiga yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah askesibilitas layanan, yang dimaksudkan pada kemudahan pengguna layanan dalam menjangkau pelayanan pemerintahan (Richardus and Indrajit, 2005). Dalam konteks penelitian ini, digitalisasi legalisasi SPBG dan PK dapat memberikan kemudahan karena pengajuan dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor P4MI Sidoarjo. Bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang berada di luar wilayah Sidoarjo, sistem ini memberikan keuntungan tersendiri karena adanya penghematan waktu perjalanan, biaya operasional, hingga pada fleksibilitas pada pengurusan dokumen. Dibuktikan dengan tingginya jumlah legalisasi setelah penetapan digitalisasi ini, dengan angka 442 berkas dalam waktu 50 hari ini, menunjukkan bahwasanya sistem baru ini dapat diakses dan digunakan secara aktif oleh P3MI. Kemudahan akses layanan digital ini dapat mempercepat kesiapan administratif calon pekera migran Indonesia (CPMI) dari berbagai daerah untuk memasuki pasar kerja Taiwan. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi di tingkat domestik dapat mempengaruhi kelancaran arus tenaga kerja internasional.

Elemen ketiga yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah akuntabilitas yang merujuk pada kejelasan tanggung jawab, pencatatan proses, serta kepastian hasil dalam pelayanan (Richardus and Indrajit, 2005). Digitalisasi legalisasi ini semakin memperjelas setiap tahapan legalisasinya, karena terdapat jejak administrasi yang lebih jelas dibandingkan dengan proses manual. Dokumen yang masuk akan dierifikasi oleh petugas sesuai dengan kewenangan dan ketentuan-

ketentuan yang berlaku, dan kemudian akan masuk ke tahap persetujuan ke pejabat yang berwenang sebelum hasil legalisasi diterbitkan. Proses ini menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam proses legalisasi, penyimpanan dokumen secara digital juga memudahkan penelusuran kembali apabila terjadi kendala ataupun kebutuhan pemeriksaan administrasi. Selain itu, keberadaan QR Code sebagai hasil legalisasi juga dapat memperkuat akuntabilitas dan memperkuat kredibilitas Indonesia sebagai negara pengirim tenaga kerja yang telah menjalankan tata kelola migrasi secara bertanggung jawab.

Digitalisasi sebagai instrumen *migration governance* dan perlindungan pra-penempatan

Penerapan digitalisasi layanan legalisasi SPBG dan PK di P4MI Sidoarjo memiliki implikasi yang luas, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat tata kelola migrasi (*migration goverance*). Dalam tata kelola migrasi, digitalisasi merupakan instrumen pendukung perlindungan PMI, khususnya dalam tahap pra-penempatan. Legalisasi SPBG dan PK tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan persyaratan administratif, namun juga menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan proses penempatan berlangsung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketepatan pemeriksaan SPBG dan PK ini menjadi bagian yang cukup penting dalam proses penempatan, karena kedua dokumen ini berisikan informasi mengenai biaya penempatan, gaji, hingga ketentuan kerja antara kedua belah pihak.

Dalam kerangka *Migration Governance Framework* (MiGOF) yang dikembangkan oleh *Intenational Organizations for Migration* (IOM) pada tahun 2015, menegaskan prinsip dan tujuan bagi negara daam mewujudkan tata kelola migrasi yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. MiGOF juga menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pengelolaan migrasi dengan tetap mementingkan adanya kerja sama antara pemangku kepentingan. Digitalisasi layanan legalisasi dapat dipahami melalui tiga aspek, yaitu perlindungan hak-hak migran serta kemitraan dan koordinasi antara pemangku kepentingan (Elgar, 2023).

Pertama, aspek perlindungan hak-hak migran yang tercermin dalam pemeriksaan SPBG dan PK sebelum dokumen tersebut dilegalisasi. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan kesesuaian informasi mengenai biaya penempatan dan ketentuan kerja antara kedua belah pihak. Hal ini berkaitan dengan keputusan Kepaa BP2MI Nomor 50 tahun 2023, yang menekankan pada komponen dan besaran biaya penempatan pekerja migran indonesia kepada pemberi kerja perseorangan di Taiwan (Indonesia, 2023). Ketentuan ini menegaskan adanya batasan maksimal biaya penempatan agar calon pekerja migran terhindarkan dari praktik *overcharging*. Oleh karena itu, digitalisasi legalisasi yang dilakukan ini dapat mendukung proses pemeriksaan dokumen secara administratif dan membantu memastikan kesesuaian dokumen penempatan dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, aspek kemitraan dan koordinasi antara pemangku kepentingan yang terlihat dari keterlibatan sejumlah aktor dalam pelaksanaan legalisasi dokumen. Proses legalisasi dokumen SPBG dan PK ini tidak hanya melibatkan peran P4MI Sidoarjo saja, namun dalam pelaksanaannya juga melibatkan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) sebagai pihak yang mengajukan juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan serta persetujuan. Dalam hal ini, Sisko P2MI menjadi sarana yang mendukung pertukaran dan pemeriksaan dokumen antar pihak yang terlibat. Keberhasilan proses legalisasi ini tidak hanya bergantung pada sistem digital, namun juga adanya koordinasi dan kesesuaian prosedur antara para aktor. Ketergantungan akan jaringan internet, kestabilan server, dan koordinasi dalam proses verifikasi dan persetujuan menunjukkan bahwa aspek kelembagaan dan kesiapan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam pelaksanaan digitalisasi layanan.

Berdasarkan kedua aspek tersebut, digitalisasi layanan legalisasi SPBG dan PK di P4MI Sidoarjo dapat dipahami sebagai instrumen pendukung tata keola migrasi, khususnya dalam proses perlindungan pra-penempatan. Digitalisasi ini menyediakan mekanisme administratif yang mendukung pemeriksaan dokumen dan koordinasi yang dilakukan antara pemangku kepentingan. Namun, kontribusi digitalisasi terhadap *migration governance* tidak cukup jika hanya dinilai melalui penggunaan teknologi, namun dapat dilihat pada bagaimana mekanisme ini dapat mendukung pemberian perlindungan hak calon pekerja migran dan pelaksanaan tata kelola penempatan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hambatan pelaksanaan digitalisasi layanan legalisasi di P4MI Sidoarjo

Meskipun digitalisasi legalisasi SPBG dan PK di P4MI Sidarjo menunjukkan dampak yang positif, hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada jumlah dan kemudahan dalam layanan legalisasi. Namun, dalam pelaksanaan digitalisasi ini juga masih mendapatkan tantangan dan kendala. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam proses transisi dari sistem manual menuju sistem berbasis digital. Kendala utama yang ada dalam digitalisasi ini adalah gangguan jaringan internet dan server sistem. Seluruh proses pengajuan, verifikasi, hingga pada penerbitan legalisasi dilakukan secara daring, maka dari itu kestabilan jaringan menjadi sangat penting dan memberikan pengaruh yang signifikan dalam digitalisasi ini. Adanya gangguan pada jaringan dan server melambat hingga dapat mempengaruhi seluruh proses legalisasi dokumen yang dilakukan, kondisi seperti ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian proses legalisasi.

Kondisi ini mencerminkan pada adanya kesenjangan yang tercipta antara komitmen normatif negara dengan kemampuan teknis infrastruktur yang mendukung pelaksanaan tersebut. Kondisi ini juga dapat menciptakan suatu ketidakpstian, karena situasi seperti ini tidak dapat dikendalikan oleh instansi pemerintahan maupun oleh P3MI sebagai pengguna layanan. Dalam mengatasi permasalahan seperti ini, respons yang diberikan oleh KP2MI adalah dengan menyediakan mekanisme mitigasi berupa surat pemberitahuan resmi yang dapat dijadikan dasar untuk dapat melakukan pengajuan legalisasi SPBG dan PK secara manual jika adanya gangguan sistem.

Respons yang diberikan oleh KP2MI telah menunjukkan adanya kesiapan dalam menghadapi permasalahan yang ada, di sisi lain mekanisme seperti ini juga membuktikan bahwa sistem digital yang ada belum sepenuhnya dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Setiap penundaan pada proses legalisasi SPBG dan PK ini juga dapat berpotensi menghambat terpenuhinya hak perlindungan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang telah tertuang pada Undang-Undang No.18 tahun 2017.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisais layanan legalisasi SPBG dan PK di P4MI Sidoarjo melalui sistem Sisko P2MI merupakan kemajuan yang penting bagi perlindungan prapenempatan pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan ditempatkan di Taiwan. Setelah terjadi transisi digitalisasi ini, kapasitas proses legalisasi dokumen meningkat dari 5,77 menjadi 8,84 dokumen per harinya dan menunjukkan adanya peningkatan dalam produktivitas layanan. Transparansi proses verifikasi juga menjadi langkah perlindungan awal terhadap potensi pelanggaran hak-hak pekerja migran. Aksesibiltas juga meningkat karenamemungkinkan bagi P3MI di luar wilayah Sidoarjo untuk melakukan legalisasi dokumen. Akuntabilitas juga diperkuat melalui adanya persetujuan berjengjang hingga penerbitan legalisasi berbasis QR Code, sehingga meningkatkan kredibilitas hasil legalisasi tersebut.

Dalam kerangka MiGOF, penelitian ini berpendapat bahwasannya digitalisasi layanan administrasi pra-penempayan bukan hanya upaya modernisasi saja, namun sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam membangun tata kelola migrasi yang bertanggung jawab, tertib, dan berbasis hak. Proses verifikasi dokumen SPBG dan PK melalui sistem digital ini berfungsi sebagai instrumen kelembagaan yang mengoperasionalkan prinsip pertama MiGOF yaitu pemenuhan hak migran dan kepatuhan terhadap standar internasional di tahapan awal, yaitu antara negara dengan calon pekerja migran. Kerangka ini berkontribusi pada literatur tata kelola migrasi dengan menunjukkan bagaimana reformasi administrasi digital di tingkat domestik dapat menjadi fondasi kepercayaan bilateral antar negara pengirim tenaga kerja dengan negara penerima.

Kemudian, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya ketergantungan infrastruktur server Sisko P2MI yang rentang terhadap gangguan, sehingga dapat menciptakan suatu kondisi yang tidak pasti baik itu bagi pelaksana legalisasi maupun P3MI. Meskipun KP2MI telah menyediakan prosedur cadangan dalam memitigasi bila terdapat gangguan, hal ini juga menunjukkan pemerintah belum siap sepenuhnya dalam menjalankan digitalisasi ini. berdasarkan UU No.18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI), perlindungan pra-penempatan merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara, bukan opsional. Maka setiap keterlambatan legalisasi SPBG dan PK secara langsung juga menghambat pemenuhan hak dari calon pekerja migran.

Penelitian ini dapat menjadi penunjang dari penelitian selanjutnya dengan mengkaji pada

baaimana sistem legalisasi digital di P4MI seluruh Indonesia, apakah peningkatan produktivitas yang terjadi di P4MI Sidoarjo dapat diaplikasikan dalam kondisi kelembagaan dan infsatruktur yang berbeda. Kemudian, hubungan antara administrasi pra-penempatan dengan dampak lanjutannya, seperti tingkat pelanggaran hak kontrak, sengketa pungutan berlebihan, dan migrasi non-prosedural. Kemudian, diperlukan pula kajian lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan yang terjadi setelah ditetapkannya digitalisasi ini antara Indonesia dengan Taiwan, khususnya dengan TETO. Dan penelitian ini menunjukkan adanya pengembangan kebijakan yang berfokus pada investasi pada ketahanan infrsatuktruktur digital yang menopang layanan pekerja migran. Karena, digitalisasi yang tidak didkukung dengan infrastruktur yang stabil akan membalikkan tujuan awal dari penetapan digitalisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, D., Prasetiyo, L. and Ponorogo, I. (2024) 'Fenomena Perempuan Pekerja Migran Indonesia untuk Kesejahteraan Keluarga', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 13. Available at: https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25518.

Bahagijo, S. and Aryani, S. (2021) 'Rapid Study on The Effectiveness of Social Security Implementation for Indonesian Migrant Workers (PMI) and their Families and its Impact during the COVID-19 Pandemic FINAL REPORT for GIZ-DJSN'.

Bao, B. *et al.* (2023) 'Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura', *Journal on Education*, 05(02), pp. 4147–4157. Available at: http://jonedu.org/index.php/joe.

Dethan, O., Pello, H. and Nubatonis, O. (2025) 'PERLINDUNGAN PRA PENEMPATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA KUPANG MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA', 2(18), pp. 410–428.

Elgar, E. (2023) *RESEARCH HANDBOOK ON THE INSTITUTIONS OF GLOBAL MIGRATION GOVERNANCE*. Edward Elgar Publishing Limited. Available at: https://doi.org/http://dx.doi.org/10.4337/9781789908077.

Hamonangan, F. (2025) 'MENJAMIN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA: TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 18 TAHUN 2017 GUARANTEE', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(5), pp. 1–15.

'Hasil Wawancara' (2026).

Indonesia, K.B.P.P.M. (2023) *BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA PERSEORANGAN DI TAIWAN*. Indonesia: https://jdih.bp2mi.go.id/uploads/20230301/20230301200732_889000086_KEPKA_Nomor__50_Tahun_2023_tentang_Biaya_penempatan__PMI_Taiwan.pdf.

Indonesia, P.R. (2017) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017*.

Pelindungan, B. and Migran, P. (2026) *Implementasi Layanan Legalisasi Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) dan Perjanjian Kerja (PK) Calon Pekerja Migran Indonesia Taiwan di Sisko P2MI*.

Richardus, P. and Indrajit, E.K.O. (2005) *Electronic government in action*.

Sidoarjo, P. (2026) 'DATA LEGALISASI DOKUMEN P4MI SIDOARJO (JANUARI-APRIL)'.

Susilo, M.M. (2026) *Mengenal Lebih Dekat BP3MI Jawa Timur : Garda Terdepan Dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia*, *Kompasiana*. Available at: https://www.kompasiana.com/muhanmaruf/671f0838c925c401df1a8012/mengenal-lebih-dekat-

bp3mi-jawa-timur-garda-terdepan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia#goog_rewarded.

Syahrizal, H. and Jailani, M.S. (2023) 'Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif', 1, pp. 13–23.

Wibowo, M.B.Ri. *et al.* (2025) 'Dinamika Pasar Tenaga Kerja Di Era Digital Implikasi Terhadap Pengangguran Dan Produktifitas Ekonomi', *Journal Of Economis and Business*, 3(1), pp. 114–121. Available at: http://jurnal.dokicti.org/index.php/ECONIS/index.

Yonatan, A.Z. (2025) *10 Negara Tujuan Utama Pekerja Migran Indonesia 2025*, *GoodStats Data*. Available at: https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-tujuan-utama-pekerja-migran-indonesia-2025-rcG6M.